

PENGARUH PENERAPAN MODEL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN *FRAUD*

Arimbi Fauziyah^{1*}, Supanji Setyawan²

^{1,2} Universitas Tidar

E-mail: ¹⁾ arimbifauziyah@gmail.com

Abstract

A system of accountants known as public sector accounting is utilized by public sector organizations. Threats to the administration of a public accounting might arise from the management structure that a business or organization has created for managing its enterprise. The threat of fraud is one of these. This review was conducted to determine the effect of the application of the public sector accounting model and internal control on fraud prevention efforts. This study uses a qualitative method with the use of previous research data. The results of the research in the form of analysis show that the application of the public sector accounting model has a positive effect on fraud prevention efforts. The results of the second analysis show a positive influence between internal control on fraud prevention efforts.

Keywords: Accounting Model, Fraud, Internal Control

Abstrak

Akuntansi Sektor Publik merupakan sistem akuntan yang beroperasi dan digunakan oleh lembaga di sektor publik. Kemanajementan suatu akuntansi sektor publik dapat mengalami ancaman dalam tatanan manajemen yang telah dibangun oleh perusahaan atau lembaga dalam mengelola perusahaannya. Salah satu ancaman tersebut adalah tindakan kecurangan (*fraud*). Tinjauan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan model akuntansi sektor publik dan pengendalian internal terhadap upaya pencegahan *fraud*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pemanfaatan data-data penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian yang berupa analisis menunjukkan penerapan model akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan *fraud*. Hasil analisis kedua menunjukkan pengaruh positif antara pengendalian internal terhadap upaya pencegahan *fraud*.

Kata Kunci: *Fraud*, Model Akuntansi, Pengendalian Internal

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia dapat dikatakan meningkat dari periode ke periode. Peningkatan ini tentunya tidak hanya karena kinerja pengelola perusahaannya, namun juga masyarakat turut terlibat di dalamnya. Meningkatnya perkembangan perekonomian dalam suatu lembaga tentunya tidak jauh dari oknum-oknum yang berkeinginan menguntungkan diri sendiri. Adakala seseorang atau kelompok ingin memperoleh lebih dari yang telah ditetapkan lembaga atau perusahaannya. Keinginan memperoleh keuntungan tersebut membuat seseorang atau kelompok untuk berbuat tidak

jujur. Contohnya dengan melakukan tindak kecurangan terhadap lembaga atau perusahaan yang sedang ditempati. Yang mana tindak kecurangan tersebut akan berakibat buruk dalam keberlanjutan pengelolaan lembaga atau perusahaan itu sendiri.

Menurut Omar et al. (2016), *fraud* digambarkan sebagai bahaya atau risiko bisnis yang dapat terjadi di entitas bisnis mana pun, termasuk organisasi perdagangan publik dan bisnis swasta. Sedangkan secara harfiah, menurut Said et al. (2018) *fraud* diartikan sebagai penipuan, kecurangan, atau penggelapan.

Secara umum, kecurangan (*fraud*) dapat dibagi menjadi tiga kategori: penyelewengan aset, pemalsuan laporan keuangan, dan korupsi (Sihombing et al., 2019). Teori *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey, menyatakan bahwa ada tiga penyebab dasar penipuan: faktor tekanan, faktor peluang, dan pertimbangan rasionalisasi. Selain Teori *Fraud Triangle*, ada juga teori *Fraud Diamond* yang memperluas *Fraud Triangle* dengan menambahkan aspek kausal kedua yang disebut kapabilitas (Bassey, 2018). Prinsip sentral teori ini adalah bahwa dua kelompok kekuatan, yaitu elemen internal dalam bentuk kapabilitas dan rasionalisasi dan faktor eksternal dalam bentuk tekanan dan kesempatan dapat menimbulkan kecurangan (*fraud*).

Fraud dapat dipecah menjadi tiga kategori perilaku, yaitu (Antarwiyati & Purnomo, 2017; Sihombing et al., 2019):

- 1) Penyalahgunaan aset, adalah jenis *fraud* yang paling sederhana untuk diidentifikasi karena melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset sehingga kerusakan yang ditimbulkan akibat *fraud* dapat diukur atau diperkirakan.
- 2) Pernyataan palsu, ketika rekayasa keuangan digunakan untuk menggambarkan laporan keuangan perusahaan untuk menyembunyikan situasi keuangannya yang sebenarnya
- 3) Korupsi merupakan salah satu jenis *fraud* yang sulit dideteksi karena dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain dalam jaringan yang terorganisir dan metodis. *Fraud* jenis ini lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah, sehingga banyak pihak yang masih belum menyadari pentingnya tata kelola perusahaan yang solid. *Fraud* dapat berkembang sebagai akibat dari tiga penyebab utama, menurut teori *fraud triangle* Donald R. Cressey: tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Norbarani & Rahardjo, 2012):
 - a) Tekanan (*Pressure*)

Seseorang dapat melakukan *fraud* karena tekanan dari faktor luar (eksternal). Tekanan ini bisa berasal dari beberapa hal, seperti tekanan dari tempat kerja, tekanan keuangan, tekanan dari perilaku yang tidak sehat, dan tekanan lainnya.
 - b) Kesempatan (*Opportunity*)

Faktor eksternal yang disebut peluang dapat menginspirasi atau mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*. Faktor ini biasanya masuk persamaan ketika ada sistem kontrol yang tergolong lemah, seperti kurangnya pemantauan atau audit yang memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi kesenjangan dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
 - c) Rasionalisasi (*Rationalization*)

Komponen ketiga ini adalah hasil dari keyakinan internal individu bahwa perilaku *fraud* itu rasional dan dapat diterima secara moral.

Faktor kapasitas (*capacity*) termasuk dalam teori *fraud diamond*, selain tiga komponen yang ditunjukkan dalam *fraud triangle*. Menurut Ruankaew (2016), Kapasitas mengacu pada posisi atau peran seseorang di dalam perusahaan memberinya kemampuan untuk menghasilkan atau memanfaatkan peluang *fraud* yang tidak tersedia bagi orang lain. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa untuk melakukan *fraud*, seseorang harus memiliki sifat dan keterampilan yang diperlukan untuk menyadari kemungkinan *fraud* dan menggunakannya untuk keuntungan pribadi (Sujeewa et al., 2018). Seseorang perlu memiliki kualitas dan kemampuan berikut untuk melakukan *fraud*:

- 1) Posisi atau tugas otoritas dalam perusahaan, seperti CEO yang sering melakukan *fraud* dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain.
- 2) Memiliki kecerdasan untuk mengenali kelemahan sistem akuntansi dan kontrol internal, memahami bagaimana mereka beroperasi, dan kemudian mengambil keuntungan darinya.
- 3) Ego dan keyakinan bahwa tindakan *fraud* tidak akan terdeteksi. Kesuksesan *fraud* akan menambah kepercayaan diri untuk melakukan *fraud* di masa mendatang guna meraup keuntungan yang lebih besar lagi.
- 4) Kemampuan untuk mengelola *fraud* dalam jangka waktu yang lama dan mengatasi stres dengan baik saat tertangkap.

Pelaku *fraud* bisa berasal dari mana saja, disela kesempatan yang bisa menjadikan kesempatan, maka *fraud* bisa saja terjadi. Menurut teori-teori *fraud* yang telah disebutkan, prinsip mendasar dari teori tersebut adalah bahwa dua kategori faktor, yaitu kekuatan internal berupa kapabilitas dan rasionalisasi dan faktor eksternal berupa tekanan dan peluang, memotivasi orang untuk melakukan *fraud*. Menurut *Fraud Triangle*, *fraud* dapat terjadi ketika ada situasi tekanan tinggi, peluang, dan didukung oleh orang-orang yang memiliki integritas rendah. *Fraud* sudah marak terjadi di dunia perusahaan entah di sektor swasta maupun disektor publik. Tidak heran segala penerapan atau pencegahan *fraud* kerap dilakukan untuk mengurangi bertambahnya kasus *fraud*.

Institusi di sektor publik menjalankan dan menggunakan sistem akuntansi yang dikenal sebagai akuntansi sektor publik. Pemerintah daerah, yayasan, partai politik, dan organisasi nirlaba lainnya adalah contoh jenis entitas yang termasuk dalam bidang akuntansi sektor publik di lembaga tinggi negara (Halim, 2014). Di Negara Indonesia sendiri *fraud* telah ada, salah satunya di bidang akuntansi yang beroperasi di sektor publik. *Fraud* ini merupakan ancaman dalam manajemen suatu akuntansi sektor publik. Dapat mengancam tatanan manajemen yang telah dibangun oleh perusahaan atau lembaga dalam mengelola perusahaannya.

Untuk mengurangi atau mencegahnya terjadinya *fraud* yang berkelanjutan, lembaga atau perusahaan diharapkan agar dapat melakukan upaya pencegahan yang dapat berawal dari dalam lembaga itu sendiri. Misalnya dengan penerapan sistem-sistem manajemen di dalamnya. Sistem tersebut dapat berupa sistem dengan penerapan model akuntansi sektor publik untuk mencegah *fraud*. Selain dengan sistem penerapan model akuntansi sektor publik, lembaga juga dapat menerapkan sistem pengendalian internal guna meminimalisir terjadinya *fraud*.

Model penerapan akuntansi diterapkan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya *fraud*. Karena dengan sistem atau model penerapan akuntansi yang tepat diharapkan

penyalahgunaan, penipuan, dan tindakan merugikan lainnya diharapkan berkurang.

Pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) adalah suatu proses tindakan dan kegiatan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang akurat, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Melihat konteks tersebut, maka fenomena yang ada di Indonesia adalah isu pencegahan *fraud* yang sudah sering terjadi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan model akuntansi sektor publik dan pengendalian internal dalam upaya mencegah *fraud* di Indonesia tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Penerapan model akuntansi sektor publik dimaksudkan sebagai suatu model atau sistem yang ditujukan dalam mengelola akuntansi sektor publik. Dengan menggunakan model-model penerapan yang ditujukan untuk meminimalisir terjadinya *fraud* atau tindak kecurangan di lembaga atau perusahaan.

Teknik pendeteksian *fraud* juga harus terus ditingkatkan agar berhasil digunakan dan mengenali tanda-tanda *fraud* menggunakan teknologi digital. Hal ini dimungkinkan oleh kemajuan teknologi digital. Menurut Donning et al. (2019), membuat sistem deteksi *fraud* bukanlah hal mudah karena melibatkan teknologi mutakhir dan memerlukan dana dari organisasi yang secara tegas menunjuknya untuk mencegah adanya *fraud*, sama seperti ketika model akuntansi digunakan di sektor publik. Namun, pemasangan sistem akan dapat membantu perusahaan bisnis dalam memantau, menganalisis, menyelidiki, dan mengambil berbagai tindakan pencegahan yang bijak untuk menemukan dan memerangi *fraud*. Tiga teknik utama yang digunakan oleh sistem deteksi *fraud*, yaitu *machine learning algorithm*, *data mining*, dan *meta learning* dapat memungkinkan sistem ini memiliki kecerdasan yang berkembang dari waktu ke waktu. Sistem ini memiliki kapasitas untuk menyimpan data tentang teknik dan fitur *fraud* yang telah diketahui, menganalisis rincian tersebut, dan membuat indikator kejadian *fraud* yang selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan *fraud*.

Suatu unit organisasi dalam unit pemerintah dianggap independen dalam konteks akuntansi sektor publik, dalam hal ini unit pemerintah yang bertindak atas namanya sendiri karena posisinya berbeda dengan pemangku kepentingan dan dianggap sebagai pusat pertanggungjawaban dengan media laporan keuangan yang dapat mencerminkan manajemen tersebut. Laporan tersebut mungkin sudah menunjukkan bahwa entitas pelapor berada di bawah kendali dan komando penuh, baik dalam hal sumber dayanya maupun kemampuannya untuk mematuhi kewajiban hukum dan menjalankan tugas untuk memenuhi misi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, hal ini harus didasarkan pada anggapan bahwa laporan keuangan yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dibuat berdasarkan beberapa asumsi, antara lain independensi, keberadaan bisnis, kelangsungan entitas tersebut, dan laporan yang diukur dalam satuan moneter. Selain itu, data ini harus memenuhi kriteria agar dapat diterapkan, dapat dipercaya, dapat dibandingkan,

dan dapat dipahami dalam hal aturan akuntansi dan pelaporan keuangan. Meskipun masih terdapat kekurangan informasi yang dapat mempengaruhi reliabilitas dan relevansi laporan.

2.2. Pengertian Pengendalian Internal

Rencana perusahaan dan semua metode terkoordinasi yang dilakukannya dapat dimasukkan dalam pengendalian internal. Untuk mencapai tujuannya, setiap perusahaan tentunya memiliki pengendalian internal. Pengaruh dewan direksi, entitas manajemen, dan anggota lainnya atas tindakan yang dilakukan sebagai jaminan untuk mencapai tujuan organisasi di bidang operasi, pelaporan, dan kepatuhan dijelaskan sebagai pengendalian internal oleh COSO (Yulianty & Suraida, 2018).

Pengendalian internal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) sebagai suatu proses tindakan dan kegiatan berkelanjutan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi secara memadai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, akurasi pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelima komponen pengendalian internal yang saling berhubungan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu:

2.2.1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan pengendalian yang mendorong perilaku etis dan mendukung penerapan prosedur pengendalian internal di tempat kerja. Hal tersebut harus dicapai dengan:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

2.2.2. Penilaian Risiko

Risiko yang dihadapi unit organisasi baik secara internal maupun eksternal harus dievaluasi melalui pengendalian internal. Identifikasi dan analisis dampak atau resiko yang dapat menghambat atau terkait dengan pencapaian tujuan organisasi merupakan bagian dari penilaian risiko yang juga termasuk memutuskan cara mengatasi risiko tersebut. Penilaian risiko adalah persyaratan bagi mereka yang bertanggung jawab atas organisasi pemerintah. Analisis risiko dan identifikasi risiko membentuk penilaian risiko. Dengan menggunakan aturan dan regulasi dalam kerangka penilaian risiko, pimpinan lembaga pemerintah menentukan tujuan organisasi mereka serta tujuan di tingkat aktivitas.

2.2.3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta pembuatan dan penerapan aturan dan prosedur untuk memastikan bahwa

langkah-langkah tersebut telah diambil secara efektif. Operasi pengendalian memerlukan pimpinan lembaga pemerintah untuk melaksanakannya dengan cara yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tanggung jawab dan fungsi lembaga tersebut di atas. Mengontrol pemrosesan informasi, memisahkan tugas, melakukan kontrol fisik, dan memantau kinerja hanyalah beberapa dari tindakan kontrol yang diterapkan. Untuk mencapai tujuan organisasi, operasi pengendalian harus efisien dan efektif.

2.2.4. Informasi dan Komunikasi

Seperti yang dijelaskan oleh komponen informasi dan komunikasi, sistem informasi sangat penting untuk keberhasilan organisasi atau untuk meningkatkan standar operasinya. Informasi yang telah tercipta dari data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan tentang bagaimana instansi pemerintah akan menjalankan tugasnya. Menggunakan simbol atau visual untuk mengirimkan pesan atau informasi adalah proses komunikasi. Penyebaran informasi harus dilakukan secara efisien. Komunikasi yang efektif dilakukan oleh pimpinan instansi dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai format dan cara komunikasi serta secara konsisten mengelola, membuat, dan meningkatkan sistem informasi.

2.2.5. Pemantauan

Pemantauan pengendalian internal adalah prosedur untuk menentukan efektivitas kinerja sistem pengendalian internal dan prosedur yang memastikan bahwa hasil audit dan evaluasi lainnya segera dilaksanakan. Pemantauan harus dapat mengevaluasi tingkat kinerja secara berkala dan menjamin bahwa saran dari temuan audit dan penilaian lainnya dapat segera diimplementasikan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Sukmadinata (2011:73) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif lebih menitik beratkan pada kualitas, mutu, dan kepentingan antar kegiatan guna menggambarkan dan mencirikan fenomena yang sudah ada, baik yang alamiah maupun buatan manusia.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Informasi penelitian ini merupakan informasi sekunder yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan, khususnya dengan mengumpulkan teori, informasi penelitian, atau kesimpulan dari penelitian sebelumnya melalui artikel jurnal dari internet dengan berbagai sumber yang terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti.

Data yang diperoleh kemudian mengalami teknik analisis kualitatif. Tiga tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut: (Bungin, 2017)

- 1) Reduksi Data

Data dianalisis oleh peneliti untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dan untuk menyaring informasi yang tidak relevan.

- 2) Penyajian Data

Untuk memudahkan analisis dan pemahaman, data disajikan dalam berbagai cara setelah diolah, antara lain dengan deskripsi, diagram, korelasi antar kategori, flowchart,

dan lain-lain.

3) Penarikan Kesimpulan Data

Kesimpulan yang ditarik melalui analisis data untuk mengatasi masalah penelitian dikenal sebagai temuan penelitian kualitatif. Dengan mengutamakan gagasan dan pemahaman peneliti yang mengacu pada teori yang bersangkutan, analisis dilakukan secara induktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Maraknya tindak kecurangan yang terjadi di perlembagaan seperti sektor publik, membuat pihak lembaga sebagai korban untuk bisa berupaya mengatasi dan mencegah terjadinya tindak kecurangan yang terjadi dan kemungkinan yang akan terjadi. Dalam sektor publik kecurangan yang terjadi atau *fraud* yang sangat merugikan banyak pihak yang terkait tentunya harus ditegaskan dalam pencegahannya.

Pencegahan *fraud* yang terjadi di sektor publik dapat dilakukan dengan salah satunya adalah penerapan model akuntansi sektor publik. Dalam hal ini, pencegahan *fraud* yang sering dilakukan dalam hal kecurangan yang biasa terjadi yaitu dalam penganggaran keuangan. Penerapan model akuntansi sektor publik ini dapat didukung dengan canggihnya alat elektronik seperti saat ini.

4.1. Pengaruh Penerapan Model Akuntansi Sektor Publik terhadap Upaya Pencegahan *Fraud* Akuntansi Sektor Publik

Pencegahan *fraud* terkait dengan penerapan tujuh faktor akuntansi sektor publik, antara lain perencanaan publik, penganggaran publik, pemenuhan anggaran publik, perolehan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan publik, audit sektor publik, dan akuntabilitas publik (Bastian, 2015). Menurut penjelasan Free (2015) tentang *fraud triangle* yang menyatakan bahwa *fraud* dapat muncul karena tiga sebab, yaitu peluang, tekanan, dan rasionalisasi, penerapan ketujuh elemen tersebut tidak lepas dari resiko *fraud*. Ditambah dengan penggunaan teknologi digital, yang tampaknya menawarkan lebih banyak peluang dan meningkatkan kapasitas sejalan dengan ide *fraud diamond* (Ruankaew, 2016; Sujeewa et al., 2018). Kemampuan atau kapasitas yang dimaksud disini adalah kemampuan untuk melakukan *fraud* dengan memanfaatkan berbagai perangkat teknologi digital.

Pada penelitian sebelumnya oleh Dian Kristiyan dan Hamidah yang diterbitkan dalam jurnal berjudul “Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik untuk Mencegah *Fraud* pada Sektor Publik di Era Digital”, ditemukan bahwa penggunaan akuntansi sektor publik bermanfaat untuk mencegah terjadinya *fraud* di sektor publik. Sektor publik di era digital jika diimplementasikan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud*, seperti akuntabilitas kinerja, dan dipadukan dengan penggunaan teknik pencegahan *fraud*. Untuk menghindari *fraud*, strategi teknis memanfaatkan layanan petugas privasi, akses IoT, memantau akses data, membuat pelaporan yang cepat, dan mengendalikan data secara real time. Dengan menerapkan pengendalian internal, strategi dua paradigma bertujuan untuk menumbuhkan budaya *anti-fraud* dan mengurangi peluang terjadinya *fraud*. Strategi pencegahan memerlukan pembuatan sistem deteksi *fraud* yang menggunakan metode machine algorithms, data mining, dan meta learning.

4.2. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Akuntansi Sektor Publik

Pengendalian internal mencakup struktur organisasi serta semua teknik terkoordinasi yang digunakan dalam organisasi. Pengendalian internal, seperti yang didefinisikan oleh Tuanakotta (2013:127) adalah seperangkat proses, aturan, dan prosedur yang direncanakan manajemen yang digunakan untuk membuat laporan keuangan yang dapat dipercaya dan mematuhi standar yang ditetapkan untuk memelihara catatan akuntansi. Penelitian menurut Maliawan et al. (2017), pengendalian internal berdampak besar pada upaya menggagalkan dan mendeteksi *fraud* dengan signifikan.

Dengan tujuan perusahaan untuk membantu baik kegiatan organisasi sektor publik tersebut, diyakini lembaga tersebut akan mampu mengembangkan organisasi atau lembaga dengan sistem pengendalian yang baik guna mencegah terjadinya *fraud*. Selain itu, dengan menumbuhkan lingkungan kontrol yang positif melalui komitmen kepemimpinan dan adanya pengawasan yang melekat pada kegiatan organisasi, didukung oleh kompensasi yang memadai dalam bentuk kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial, pencegahan *fraud* akan bisa teratasi. Tujuan tersebut akan dicapai dengan meningkatkan budaya organisasi, meningkatkan efektivitas pengendalian, dan mengefektifkan fungsi audit internal. Oleh karena itu, jika akuntansi sektor publik diterapkan secara efektif dan pengawasan terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah dilakukan, maka akan terjadi akuntabilitas yang baik atas kinerja instansi tersebut, dengan konsekuensi pencegahan *fraud*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa di era digital, penggunaan akuntansi sektor publik dapat mengurangi *fraud* di sektor publik asalkan dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur seperti akuntabilitas kinerja dan penerapan teknik pencegahan *fraud* termasuk strategi teknologi, pendekatan dua paradigma, dan strategi pencegahan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan pengendalian internal dapat mengurangi peluang individu untuk melakukan *fraud* dan berdampak langsung pada pencegahan *fraud* yang efektif. Ungkapan ini dapat diartikan bahwa jika pengendalian internal diterapkan sejalan dengan prosedur operasi standar yang telah ditentukan sebelumnya, maka kemungkinan pencegahan *fraud* dapat ditingkatkan, sehingga mencegah kerugian bagi organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antarwiyati, P., & Purnomo, R. E. (2017). Motivasi melakukan *fraud* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 21(2), 157–166.
- Bassey, E. B. (2018). Effect of forensic accounting on the management of *fraud* in microfinance institutions in Cross River State. *Journal of Economics and Finance*, 9(4), 78–79.
- Bastian, I. (2015). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. In *In Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. PT. Fajar Interpretama Mandiri.

- Donning, H., Eriksson, M., Martikainen, M., & Lehner, O. M. (2019). Prevention and Detection for Risk and Fraud in the Digital Age—the Current Situation. *ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives*, 8, 86–97.
- Free, C. (2015). Looking through the fraud triangle: A review and call for new directions. *Meditari Accountancy Research*.
- Halim, A. (2014). Manajemen keuangan sektor publik. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Maliawan, I. B. D., Edy Sujana, S. E., Diatmika, I. P. G., AK, S. E., & Si, M. (2017). Pengaruh Audit Internal Dan Efektivitas Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)(Studi Empiris Pada Bank Mandiri Kantor Cabang Area Denpasar). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Norbarani, L., & Rahardjo, S. N. (2012). *Pendeteksian kecurangan laporan Keuangan dengan analisis fraud Triangle yang diadopsi dalam sas no. 99*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Omar, M., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2016). The causes, impact and prevention of employee fraud: A case study of an automotive company. *Journal of Financial Crime*.
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the fraud diamond. *International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER)*, 7(1), 474–476.
- Said, J., Alam, M. M., Karim, Z. A., & Johari, R. J. (2018). Integrating religiosity into fraud triangle theory: findings on Malaysian police officers. *Journal of Criminological Research, Policy and Practice*.
- Sihombing, E., Erlina, R., & Muda, I. (2019). The effect of forensic accounting, training, experience, work load and professional skeptic on auditors ability to detect of fraud. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 474–480.
- Sujeewa, G. M. M., Yajid, M. S. A., Azam, S. M. F., & Dharmaratne, I. (2018). The new fraud triangle Theory-Integrating ethical values of employees. *International Journal of Business, Economics and Law*, 16(5), 52–57.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Tuanakotta, T. M. (2013). Audit berbasis ISA (international standards on auditing). *Jakarta: Salemba Empat*, 55.
- Yulianty, T., & Suraida, I. (2018). *Pengaruh Audit Internal Dan Implementasi Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)(Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Wilayah Bandung)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.